

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bintoro, Tjokroamidjojo. 1988. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES
- Dariyo, A. (2020). *Psikoyuridis Perkawinan Pernikahan Usia Din*. Malang: Indomedia Pustaka.
- Fadjar, H. M., & Kp, S. (2020). Pemberdayaan Ekonomi, Stop Pernikahan Dini. Deepublish.
- Fibrianti, S. S. T. (2021). *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*. Ahlimedia Book.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Haryanto, D. (2011). *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Judiarsih, S. D. (2018). *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Labolo, M. (2007). *Memahami ilmu pemerintahan : suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Miftah Thoha. (2005). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi*. Jakarta: Mudrajad.
- Mustofa, S. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Bogor: Guepedia Publisher.
- Nain, U. (2017). *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Novita, A. (2019). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah Daerah Lombok Barat) Tahun 2018*. Lombok Barat: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Osbon, D., & Gaebler, T. (1996). *Reinventing Government*. Pansus Perbatasan Negara dan Tim Kerja Perbatasan Negara Komite I.
- Rasyid, R. (1997). *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Satriyandari, Y. (2021). *Pernikahan Dini Usia Remaja*. Sleman: Deepublisher.
- Sekar, E. (2017). *Implementasi perlindungan Anak dari Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak*. Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ubedilah,dkk, Demokrasi, HAM,dan Masyarakat Madani,,Jakarta ,Indonesia Center for CivicEducation, 2000, hlm.170 .
- Veithzal Rivai. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widjaja,Otonomi Daerah dan Daerah Otonom ,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2002,hlm. 76.

Jurnal :

- Alfana, M. A. (2017). Pernikahan Dini dan Agenda Kebijakan ke Depan (Kasus di Kabupaten Sleman). *Jurnal KajianIlmuAdministrasi Negara, Volume 5 Nomor 2*, 137-148.

- Badan Pusat Statistik. (2020). Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Pencegahan Perkawinan Dini*, 10-44.
- Jabbar, A., & Rusdi, M. (2020). Strategi Pemerintah dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 163-172.
- Maudina, L. D. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 89-95.
- Mufid, F. L. (2021). Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini pada Remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember. *JURNAL RECHTENS*, Vol. 10, No. 1, 109-119.
- Muhadara, I. (2016). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2 Nomor 3, 285-300.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1), 1-12.
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), 64-73.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Yudisia*, 387-409
- Rustiana, E., Hermawan, Y., & Wahyudi, Y. T. (2020). Pencegahan Pernikahan Dini. *Budaya dan Masyarakat*, 1(1), 11-15.
- Wulanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Suparman, S. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *JNKI (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia)(Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)*, 5(1), 68-75.

Undang – undang :

- Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak
- Peraturan Bupati Gunung Kidul nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Anak
- Peraturan Bupati Lombok Timur nomor 41 tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak
- Peraturan Bupati Cirebon nomor 12 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak